

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin yang bertujuan untuk percepatan pemberian raskin kepada masyarakat dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 tahun 2014. Tentang Kebijakan Perberasan Nasional. Masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta mengurangi angka kemiskinan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sudah cukup baik. Namun belum bisa dikatakan efektif, hal ini dikarenakan meskipun pelayanan Program raskin secara keseluruhan menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat namun masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang ada yaitu:

##### **1. Akses**

Ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui program raskin dan masyarakat kurang menyadari adanya raskin. masyarakat bisamelakukan pendaftaran untuk penerimaan program raskin dengan menggunakan komunikasi via Whatsapp, Email, dan situs web Kantor Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang untuk memudahkan masyarakat dalam penerimaan program raskin, akantetapi masih ada beberapa masyarakat yang belum memiliki alat Komunikasi yang menunjang sehingga dilakukan kegiatan sosialisasi di setiap RT/RW yang ada

##### **2. Cakupan**

Masih banyak masyarakat di Kelurahan tersebut belum mendaftar untuk mengikuti program tersebut karena ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya program raskkin dan juga belum

lengkap.

### 3. Ketepatan Layanan

Ketepatan layanan program raskin di Kelurahan Oetete masih belum maksimal karena masih banyak masyarakat yang tidak melengkapi berkas dan juga keterlambatan penerbitan program raskin yang dilakukan oleh petugas Kantor Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang.

### 4. Akuntabilitas

Tindakan para implementor dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan keluaran kebijakan kepada kelompok sasaran program raskin belum maksimal karena masih ada beberapa masyarakat belum mendapatkan raskin mereka sampai dengan saat ini.

Adapun beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam Proses Implementasi Program raskin

#### a. Faktor Pendukung

- 1) Kerja sama antar aparat
- 2) Komunikasi yang baik

#### b. Faktor Penghambat

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat
- 2) Masyarakat yang Sudah Pindah

## 6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan peneliti yaitu:

1. Hendaknya kebijakan bantuan beras miskin tersebut diarahkan untuk masyarakat miskin yang betul-betul membutuhkan bantuan dan termasuk kategori miskin agar bantuan beras miskin dilakukan secara transparan dan sesuai jadwal dan dilaporkan juga kepada seluruh masyarakat sebagai bentuk transparansi dan di akuntabilitas kepada publik.
2. Hendaknya penyelenggara kebijakan oleh staf, pegawai, sebaiknya tidak hanya berfokus pada masalah-masalah anggaran yang telah ditetapkan tetapi juga fokus pada cara pelaksanaan kebijakan.
3. Dalam proses sosialisasi yang dilakukan perlu dukungan dengan komunikasi secara baik dalam pelaksanaan kebijakan bantuan berasmiskin.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Faried. 2012. *Studi Kebijakan Analisa*, Bandung: Refika Aditama
- Ali, Faried, 1998. Volume 5. *Buku Metode Penelitian Sosial dalam Bidang Pemerintahan dan Administrasi*.
- Ali, Faried. 2000. *Analisa Kebijakan Otonomi Daerah. Studi Metametodologi Kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Kupang*, PPS -UNHAS
- Bernardin, H. J. & Russe, J. E. A 1993. *Human Resource Management an experiential approach*, Singapore : Mc Graw- Hill, Inc.
- Greenberg, J. 2005. *Behaviour in Organizations, Understanding and Process*, McGraw- Hill: Prentice Hall.
- James. E. Anderson, dan Winarno. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.
- Leo, Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*, Cetakan
- Pace.R. Faules. 2000. *Komunikasi Organisasi*. Bandung : Rosda
- Purwanto dan Sulisyasuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Gava Media*. Yogyakarta. Volume 3 *Buku Hukum Administrasi Negara*.
- Ripley, Randall B. Dan Franklin, Grace A. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy* Chicago: The Dorsey Press
- Woll, Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. “*Teori dan Konsep Kebijakan Publik*”
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

### UUD :

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2014. Berdasarkan Menteri dalam Negeri No.42 Tahun 2011. Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri dan Direktur utama Perum Bulog pasal 1 ayat 1 tahun 2003. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2007. Tentang, *Anggaran biaya dan pendapatan perusahaan umum Bulog*.

### WEBSITE:

- <https://pramascita.wordpress.com/2013/06/07/implementasi-kebijakanpublik/html>
- <https://hykurniawan.wordpress.com/2009/07/30/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-keberhasilan-implementasi-kebijakan/html>
- <http://rintosusantotempirai.blogspot.co.id/2014/10/teori-implementasi-kebijakan-publik.html>